

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

Penelitian ini membahas tentang teori kemudian disertakan sebuah konsep yang akan di gunakan peneliti sebagai pegangan dalam proses maupun tahapan-tahapan pembahasan hasil penelitian. Teori serta konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strategi, serta konsep maupun dasar hukum tentang Kota Layak Anak beserta penjelasannya yang akan di jelaskan dan dijabarkan lebih lanjut dalam bab ini.

#### **A. Strategi**

Strategi sendiri merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Dalam hubungannya dengan perencanaan strategis mempunyai tujuan agar perusahaan dapat melihat secara objektif kondisi internal dan eksternal, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.<sup>20</sup>

Menurut Panji Anoraga, bahwa Strategi adalah penetapan sasaran dan tujuan jangka panjang sebuah organisasi pemerintah, dan arah tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan dari suatu organisasi pemerintah itu.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Rangkuti,F.2005. Analisis SWOT, Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta:PT Pustaka Utama

<sup>21</sup> Panji Anoraga, S.E., M.M. 2000. *Manajemen Bisnis*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. Hal, 339.

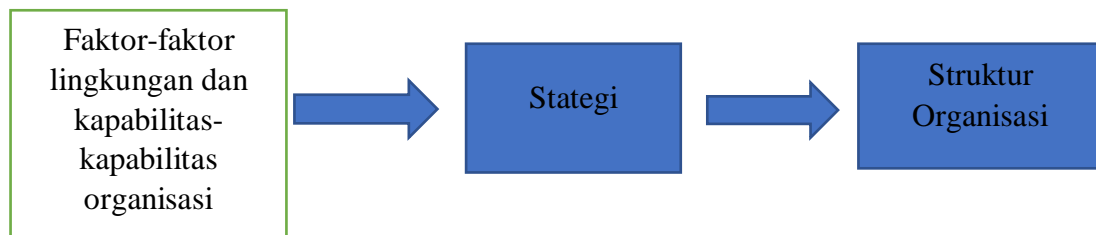
Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akuisisi, pengembangan produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi merupakan pengurangan beberapa jenis asset baik dalam bentuk finansial atau barang dan joint venture yang merupakan kerja sama antara dua sektor atau lebih yang berasal dari perusahaan dalam negeri dengan perusahaan asing. Berdasarkan definisi di atas disimpulkan bahwa manajemen strategi merupakan suatu rangkaian proses pengambilan keputusan strategik yang meliputi perumusan (formulating), implementasi (implementing), serta evaluasi (evaluating) dalam mencapai tujuan. Berikut ini dikemukakan beberapa pendapat para pakar mengenai konsep manajemen strategi, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan di implementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian organisasi tersebut.<sup>22</sup>

Strategi merupakan penerjemah dari analisis lingkungan dan analisis terhadap kemampuan internal atau kapabilitas organisasi, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam struktur organisasi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sondang P, Siagian.2006. *Manajemen Stratejik*. Jakarta, Bumi Aksara.

<sup>23</sup> Kusdi.2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta.Salemba humanika.Hlm:89



**Gambar 2.1 Imperatif Strategi**

Strategi dulunya hanya dijadikan sebagai variabel yang menjembatani faktor-faktor lingkungan dan kapabilitas-kapabilitas organisasi dengan struktur organisasi. Kemudian terjadi menyebar luasnya segala konsep perencanaan strategis (corporate planning), strategi berkembang menjadi bidang kajian mandiri, khususnya disebut sebagai strategi bisnis (business strategy). Lingkup kajiannya hubungannya sangat erat dan sangat sering berkaitan dengan ilmu marketing, dan analisis mikroekonomi (akunting dan keuangan), daripada teori organisasi. Kendati demikian, strategi tetaplah suatu hal yang penting yang berda di tengah-tengah suatu teori organisasi.

Strategi dalam konteks organisasi adalah penetapan berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang yang bersifat mendasar bagi sebuah organisasi, yang dilanjutkan dengan penetapan rencana aktivitas dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan guna mencapai berbagai sasaran tersebut, mendefinisikan.<sup>24</sup>

Pendapat yang dikemukakan Jenkins yang dikutip oleh Parsons dapat dipahami implementasi kebijakan publik merupakan proses perubahan dari

---

<sup>24</sup> Robbins, S. 1990. *Organization Theory: Structure, Design and Applications*. Englewood Cliffs, NY: Prentice-Hall.

kehidupan politik untuk menjalankan interaksi satu sama lain yang membuat mereka bertindak secara berbeda. Pemahaman Jenkins didukung pendapat dari Grindle yang dikutip oleh Wahab yang lebih lanjut dijelaskan tentang implementasi diartikan, oleh sebab itu tidak terlalu salah apabila dikatakan implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan kebijakan<sup>25</sup> yaitu *Strategy can be defined as the determination of the basic long-term goals and objectives of an enterprise, and the adoption of action and the allocation of resources necessary for carrying out these goals.*

Salah satu contoh suatu keputusan-keputusan mendasar yang masuk dalam kategori strategi yaitu: memperluas volume aktivitas organisasi, membuat cabang atau kantor wilayah baru, perubahan baru atau menambah fungsi-fungsi baru atau mendiversifikasi kegiatan dari yang sudah tercantum sebelumnya. Disusun dan diimplementasikan sebuah strategi untuk mencapai berbagai tujuan-tujuan yang lebih ditetapkan, sekaligus mempertajam dan memperluas aktivitas organisasi pada bidang-bidang baru dalam rangka memberikan timbal balik lingkungan.

#### a. Model Strategi

Terdapat dua pendapat mengenai bagaimana strategi disusun dalam organisasi, kelompok pertama adalah mereka yang meyakini bahwa strategi merupakan suatu perencanaan atau seperangkat panduan eksplisit yang disusun sebelum organisasi mengambil tindakan (*planning mode*). hal ini erat kaitannya dengan model rasional yang dikembangkan para pemikir perspektif modern.

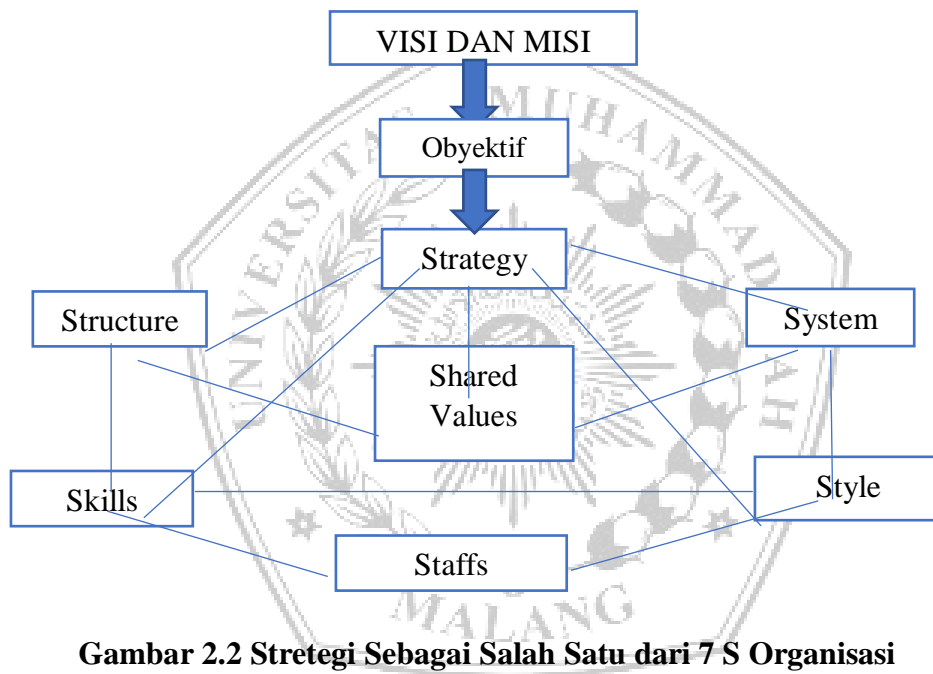
---

<sup>25</sup>Sholichin, Abdul Wahab. 2012. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara. Hlm 126

Kelompok kedua, yang disebut evolutionary mode, dicerminkan bahwa strategi tidak diwajibkan suatu perencanaan yang sistematis dan terperinci. Dilihat oleh mereka bahwa kenyataannya dilapangan sangat sering mengelolah organisasi suatu keputusan strategi diambil beruntun atau satu demi satu atau selangkah demi selangkah, beriringan dengan adanya perkembangan organisasi itu sendiri, sebelum pada akhirnya menjadi suatu strategi yang utuh dan lengkap. Sementara itu, kajian dalam teori organisasi lebih membebaskan kepada pokok masalah bagaimana strategi saling terhubung antara organisasi dan lingkungannya. Hal tersebut memiliki pengaruh perspektif modern sangat kuat, khususnya pada era 1960 dan 1970 dengan menekankan aspek rasional dari perencanaan strategis.

Model rasional penyusunan strategi merupakan bagian proses yang memiliki beberapa rentetan yaitu tiga tahap: (1) analisis, (2) formulasi dan (3) implementasi, tahap awal pada analisis mencakup dua hal yaitu analisis eksternal dan analisis internal. Analisis eksternal adalah tinjauan terhadap lingkungan yang nantinya mendapatkan informasi data mengenai beberapa peluang maupun ancaman. Tahap kedua yaitu formulasi strategi prosesnya tidak secara pragmatis, namun akan terkontrol oleh nilai-nilai organisasi dan tanggung jawab sosial, yang mana bertujuan agar strategi yang direncanakan mulai dari awal memiliki tanggung jawab secara nilai maupun secara sosial. Proses didapat beberapa pilihan strategi, maka perilaku selanjutnya adalah mencari kebenaran maupun kesalahan pilihan-pilihan tersebut. Mengacu pada data SWOT dan memiliki kontrol oleh social responsibility dan manajerial values, maka pengambil kebijakan dapat memutuskan strategi terbaik yang harus diambil.

Berdasarkan model strategi Kinsley menjelaskan bahwa strategi digambarkan sebagai salah satu hal yang memengaruhi organisasi, yaitu bersama dengan nilai organisasi (*shared value*), sistem operasional (*systems*), struktur organisasi (*structure*), kemampuan anggota (*skills*), jajaran pengelola (*staffs*), dan gaya pengelolaan (*style*). Berikut model 7S dari Kinsley yang menjelaskan bahwa strategi memiliki hubungan timbal balik dengan beberapa dimensi organisasi tersebut.



**Gambar 2.2 Stretegi Sebagai Salah Satu dari 7 S Organisasi**

Ruang lingkup strategi jangkauanya luas sejalan adanya berbagai macam kegiatan aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi. Kemudian munculah sedikitnya empat dimensi yang menjadi pokok utama yang terkandung dalam strategi Robbins sebagaimana dikutip dalam buku Kusdi, yaitu:

1. Inovasi, strategi inovasi secara terpilih dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan yang menjunjung tinggi inovasi adalah ujung keunggulan dalam bersaing. Tidak semua organisasi maupun perusahaan melakukan strategi inovasi, tetapi pada waktu-waktu tertentu barangkali birokrasi terdapat pada suatu badan pemerintahan bergantung pada strategi inovasi yang bersifat terpilih karena tujuannya memperbaiki pelayanan.

2. Diverensiasi Pasar, strategi diverensiasi pasar dipaparkan agar terciptanya kelayakan konsumen terhadap sebuah jasa maupun produk yang unik sifatnya, yang artinya lain dari pada yang lain yang ada di pasaran. Namun strategi ini tidak selalu diadakanya menciptakan jasa atau produk yang mahal atau kelas tinggi, dengan kata lain sesuatu yang didalamnya terdapat nilai plus yang berbeda dari jasa atau produk-produk yang sudah ada. Strategi ini biasanya diperkuat dengan segmentasi pasar, iklan dan permainan harga.

3. Jangkauan (Breadth), strategi jangkauan adalah kepatenan ruang lingkup pasar dimana organisasi yang akan pelayan: jenis konsumen atau ragam, jenis jasa atau produk yang akan ditawarkan dan cakupan geografisnya. Beberapa organisasi secara sengaja jangkauan yang terbatas menjadi fokus jangkauanya, misalnya produk dan jasa tertentu atau wilayah, hanya untuk kategori konsumen, ada juga yang memilih jangkauanya dikembangkan seluas-luasnya dengan maksud menguasai pangsa pasar.

4. Pengendalian biaya (Cost Control), strategi pengendalian biaya adalah seberapa sejauhnya perusahaan mengawasi anggaran atau biaya secara tidak main-

main. Strategi memiliki peran utama, khususnya saat pengelola organisasi wajib menyalurkan sumber daya yang dibatasi untuk mencapai sasaran maupun tujuan utama organisasi.

Keempat dimensi yang dijelaskan diatas adalah pokok-pokok penting yang selalu dibawah pantauan penyusun strategi. Saat strategi dikembangkan seseorang pengelola organisasi membutuhkan sebuah keputusan apakah organisasi menjalankan tugas sesuai inovasi atau hanya cukup pada penggunaan proses atau mekanisme konvensional. Dari sisi lain dapat disimpulkan bahwa strategi dalam organisasi adalah suatu tahapan melalui proses yang berkelanjutan, pada tahap akhir adalah tahap implementasi yang dibutuhkan evaluasi, yang memiliki keterkaitan dengan tercapainya atau tidak tercapainya maksud dan tujuan strategi yang sudah disusun sejak awal. Pada saat hasil evaluasi ini akan dijadikan bahan dalam proses susunan atau perubahan yang baik dalam strategi di masa selanjutnya. Model rasional evaluasi dilaksanakan secara sistematis dan tersusun, sama halnya bagaimana saat strategi pada penyusunan awalnya. selain itu model evolusioner perancangan tidak dilakukan secara tersendiri bagaimana dan kapan suatu strategi di evaluasi, namun baik model evolusioner maupun konvensional tidak akan memberikan ruang terkait inherent antara tujuan dan strategi. Kebaikan yang ada dalam strategi akan dilaksanakan pula secara baik dengan begitu logika organisasi akan mengarahkan pada tujuan-tujuan yang sudah disusun sejak awal.



## **B. Kota Layak Anak**

### **1. Konsep Kota Layak Anak**

Pengertian akan hal Kota Layak Anak awal mulanya dari seorang peneliti yang bernama Kevin Lynch menyatakan bahwa “lingkungan kota yang sangat baik untuk anak adalah yang memiliki regulasi yang tegas sekaligus jelas untuk memberikan ruang kepada anak agar menyelidiki dan mempelajari lingkungan atau dunia milik mereka.”

Alasan diperlukanya Kota Layak Anak antara lain: (1) Kota adalah tempat lahirnya peningkatan jumlah anak yang menjulang (Kepadatan penduduk tinggi), (2) beberapa kota besar tidak ramah dan sangat minim yang meberikan perhatian prioritas anak dan kebutuhan anak, (3) Meningkatkan anak yang hidup dalam kemiskinan, (4) Anak yang tinggal di perkotaan berada dibawah ancaman kondisi lalu lintas, kekerasan dan polusi.

Kota Laya Anak merupakan kota didalamnya terdapat jaminan hak-hak anak yang menjadi bagian penduduk kota. Bagian dari penduduk kota anak dapat : (1) ikut serta dalam pembuatan kebijakan yang dapat merubah kotanya, (2) Menggambarkan sekaligus menunjukan ungkapan mereka mengenai bagaimana kota yang mereka idamkan, (3) Ikut menyuarakan pendapat dalam lingkungan keluarga, sosial dan komunitas, (4) Memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan sosial dan budaya.

Upaya pemenuhan hak anak dan bebagai kebutuhan merupakan hal yang wajib bagi Negara yang memiliki regulasi dalam Undang-Undang dan Peraturan

Pemerintah Negara Republik Indonesia. Dimana kota memiliki komitmen memenuhi hak anak segera menekankan tata laksana pemerintahan beracuan kepada Undang-Undang Negara, Peraturan Pemerintah, dan prinsip umum dari Konvensi Hak Anak yang meliputi: (1) Non-diskriminasi, (2) Kepentingan terbaik anak, (3) Keberlanjutan, (4) Semua anak setara, (5) Rentan dan perlu dukungan khusus, (6) Kelangsungan hidup, (7) kedinamisan dalam hak hidup yang dibutuhkan pencegahan, (8) Tumbuh kembang dalam arti luas, (9) Perlindungan anak, (10) perlindungan.

Pokok prinsip kepentingan yang baik bagi anak adalah inti dari prinsip umum karena hal tersebut adalah bagian utama dalam filsafat konvensi hak anak. Yang dimaksudkan kepentingan terbaik bagi seorang anak adalah norma yang menyeluruh yang tertuang dalam konvensi hak anak yang meliputi:

- 1) Hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang
- 2) Hak untuk mendapatkan nama
- 3) Hak untuk mendapatkan identitas
- 4) Hak untuk mendapatkan kewarganegaraan
- 5) Hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak
- 6) Hak untuk mendapatkan standar kesehatan yang paling tinggi
- 7) Hak untuk mendapatkan perdulian khusus dalam konflik bersenjata
- 8) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik hukum
- 9) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi, sebagai pekerja anak

- 10) Hak untuk mendapat perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi dalam penyalahgunaan obat-obatan
- 11) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi penyalahgunaan seksual
- 12) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dari penculikan, penjualan, dan perdagangan anak-anak
- 13) Hak untuk hidup dengan orang tua
- 14) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami eksploitasi sebagai anggota kelompok minoritas atau masyarakat adat
- 15) Hak untuk tetap berhubungan dengan orang tua bila dipisahkan dengan salah satu orang tua
- 16) Hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan
- 17) Hak untuk bermain
- 18) Hak untuk berinteraksi
- 19) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi yang genting
- 20) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan seni dan budaya
- 21) Hak untuk bebas beragama
- 22) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengungsi
- 23) Hak untuk bebas berserikat
- 24) Hak untuk bebas berkumpul secara damai
- 25) Hak untuk mendapatkan perlindungan pribadi
- 26) Hak untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber

- 27) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi
- 28) Hak untuk mendapatkan perlindungan dari siksaan

Sedangkan konsep Kota Ramah Anak menurutn UNICEF adalah:

- 1) Mereka juga bisa berperan dalam kehidupan keluarga, komunitas dan sosial
- 2) Kota yang menjamin hak tiap anak sebagai warga kota dan keputusanya bisa ikut memengaruhi kebijakan yang diambil di Kotanya
- 3) Anak juga punya ruang hijau untuk taman dan hewan, hidup dilingkungan bebas polusi, berperan dikegiatan sosial dan budaya, hingga bisa mengakses tiap layanan tanpa memperhatikan suku, agama, kekayaan, gender dan kecacatan.
- 4) Mereka juga harus mendapatkan layanan dasar dibidang kesehatan dan pendidikan, terlindungi dari eksploitasi, kekejaman dan perlakuan salah, serta aman dijalan maupun saat bertemu, bermain dengan temannya

## **2. Dasar Hukum Kebijakan Kota Layak Anak**

Kebijakan Kota Layak Anak memiliki landasan kebijakan yang awalnya ada karena perkumpulan Internasional kemudian diturunkan kepada perkumpulan Nasional, hal tersebut diturunkan guna mengimplementasikan cita-cita seluruh

negara di dunia untuk menciptakan sebuah kelayakan untuk anak dari sudut kota yang tidak hanya menyentuh internasional namun nasional juga ikut tersentuh. Terdapat dua landasan kebijakan guna mewujudkan Kota Layak Anak yaitu yang dikenalkan pertama kali yaitu landasan internasional dan landasan nasional.

Yang pertama landasan internasional mencakup empat bagian, yang pertama yaitu Konvensi PBB Hak Anak Tahun 1989, yang kedua yaitu Agenda 21 Bab 25, KTT Bumi Rio de Janeiro, yang ketiga yaitu Agenda Habitat, Konferensi Habitat II (City Summit II) Istanbul, dan yang terakhir yaitu World Fit For Children.<sup>26</sup> Berikut paparan tentang masing masing landasan internasional.

**a) Konvensi PBB Hak Anak Tahun 1989**

Konvensi PBB anak yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi No.44/25 tanggal 20 November 1989. Konvensi ini secara tegas menetapkan hal-hal penting tentang sebagai berikut:

- Hak-hak perlindungan dari penelantaran dan kekerasan fisik atau mental, termasuk siksaan dan eksploitasi
- Hak-hak yang melekat pada diri anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan diri mereka.
- Hak-hak atas sebuah nama dan kewargaan sejak lahir
- Hak-hak atas pemeliharaan, pendidikan dan perawatan khusus

---

<sup>26</sup> Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Keluarga Berencana (BPMKB) KOTA MALANG. Pemetaan Kota Layak Anak (KLA) Kota Malang Tahun 2008. 2008. Hal 7-12

- Hak-hak atas standard kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dengan menitik beratkan pada upaya-upaya preventif, pendidikan kesehatan, dan penurunan angka kematian anak
- Hak-hak atas pendidikan dasar yang harus disediakan oleh Negara. Dengan penerapan disiplin dalam sekolah yang menghormati harkat dan martabat anak
- Hak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat merugikan pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan dan kesejahteraan anak
- Hak-hak untuk beristirahat dan bermain, dan mempunyai kesempatan yang sama atas kegiatan-kegiatan budaya dan seni
- Hak-hak memperoleh perlindungan dari upaya penculikan dan perdagangan anak
- Hak-hak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan keterlibatan dalam produksi atau peredaranya
- Hak-hak mendapat perlakuan manusiawi dalam proses hukum sehingga memajukan rasa harkat dan martabat anak-anak yang terlibat khusus hukum untuk kepentingan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat
- Hak-hak memperoleh perawatan atau pelatihan khusus untuk penyembuhan dan rehabilitasi bagi korban perlakuan buruk, penelantaran dan eksploitasi

#### **b) Agenda 21 Bab 25, KTT Bumi Rio de Janeiro**

Pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil 1992, para Kepala Pemerintah dari seluruh dunia menyepakati prinsip-prinsip Agenda 21 yaitu program aksi untuk pembangunan berkelanjutan. Kesepakatan di Bab 25 Agenda 21 ditunjukkan untuk anak dan remaja yang secara khusus mendesak pemerintah untuk :

- Melakukan Konvensi Hak Anak
- Melaksanakan program-program untuk menjangkau sasaran-sasaran yang ditetapkan oleh Pertemuan Puncak Dunia untuk Anak, antara lain menkankan partisipasi anak dalam mengelolah lingkungan
- Memasukkan semua kepentingan anak kedalam semua kebijakan dan strategi yang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan
- Memperluas pendidikan bagi anak, terutama anak perempuan

#### **c) Agenda Habitat, Konfrensi Habitat II (City Summit II) Istanbul**

Pada konvensi Habitat II atau City Summit, Istanbul, Turki 1996, Perwakilan pemerintah dari seluruh dunia bertemu dan menandatangani Agenda Habitat yakni sebuah program aksi untuk membuat pemukiman lebih nyaman untuk ditempati dan berkelanjutan. Paragraph 13 dari pembukaan Agenda Habitat, secara khusus menegaskan bahwa anak dan remaja harus mempunyai tempat tinggal yang layak; terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik kota maupun komunitasnya. Melalui City Summit itu, UNICEF dan UNHSHBITAT memperkenalkan Children Friendly City Inisiative (Inisiatif Kota Ramah Anak),

terutama menyentuh anak kota, khususnya yang miskin dan yang terpinggirkan dari pelayanan dasar dan perlindungan untuk menjamin hak-hak dasar mereka. Kota Ramah Anak adalah kota yang menjamin hak-hak setiap anak sebagai warga kota. Sebagai warga kota anak dapat:

- Mengekspresikan pendapat mereka tentang kota yang mereka inginkan
- Berkontribusi terhadap kebijakan yang memengaruhi kotanya
- Berpartisipasi dalam kegiatan budaya sosial
- Dapat berpartisipasi dalam kehidupan keluarga, komunitas dan sosial

#### **d) World Fit For Children**

Pada UN Special Session on Children, Mei 2002 para walikota menegaskan komitmen mereka untuk aktif menyuarakan hak anak, pada pertemuan tersebut. Mereka juga merekomendasikan kepada walikota seluruh dunia untuk:

- Mempromosikan partisipasi anak sebagai aktor perubah dalam proses pembuatan keputusan di kota mereka terutama dalam proses pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pemerintah
- Mengembangkan rencana aksi untuk kota mereka menjadi Kota Ramah dan melindungi hak anak

Pertemuan ini mendeklarasikan Gerakan Global yang membantu membangun suatu dunia yang layak bagi anak dengan 10 komitmen yaitu:



- Dahulukan kepentingan anak
- Berantas kemiskinan, tanamkan investasi pada anak
- Jangan sampai seorang anak tertinggal
- Didiklah setiap anak
- Perawatan bagi setiap anak
- Lindungi anak dari peperangan
- Lindungi anak terhadap penganiayaan dan eksploitasi
- Berantas HIV/AIDS
- Dengarkan anak dan pastikan partisipasi mereka
- Lindungi bumi bagi anak

Yang kedua landasan nasional mencakup lima bagian, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Peraturan Pemerintah nomor 65 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal. Berikut paparan masing-masing tentang landasan nasional :

#### **e) Undang Dasar 1945**

Konstitusi secara tegas mengatur hak-hak. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28B Ayat 1 dan 2, Pasal 28C Ayat 1 dan 2, pasal 28E Ayat 3, Pasal 28G Ayat 1 dan 2, Pasal 28H Ayat11, Pasal 28 Ayat 1 dan 2.

**f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak**

Untuk mengimplementasikan amanat konstitusi Presiden dan DPR sepakat mengeluarkan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Khusus dalam partisipasi mereka dalam proses pembangunan, UU ini secara tegas mengakui hak anak untuk menyatakan pendapatnya seperti yang termuat dalam Pasal 10 dan Pasal 24.

**g) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal**

Agar tercapainya Kota Layak Anak pemerintah memerlukan susunan standardisasi pelayanan minimal khususnya Kota Layak Anak. Standard ini berpegang teguh pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 tentang pedoman dan penerapan standar pelayanan minimal dengan harapan pemerintah yang mungkin dapat menjadikan kebijakan Kota Layak Anak menjadi bersaing dengan kota kota lain yang beacuan dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah pada tingkat Kota satupun Kabupaten.